

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan negara merupakan sebuah jaminan perlindungan bagi setiap warga negara. Oleh karenanya negara sebagai organisasi besar yang di dalamnya terdapat berbagai instrumen pengatur kehidupan masyarakat haruslah mampu mewujudkan kesejahteraan. Untuk itulah maka, negara memerlukan sebuah instrumen pengatur sebagai jalan alternatif mewujudkan sebuah tatanan yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini merupakan cita-cita pendiri (*founding father*) Indonesia sebagaimana yang telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) pada alinea ke empat (4) menyebutkan;

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, penegasan tersebut terdapat dalam konstitusi dasar negara Indonesia UUD 1945 amandemen Pasal 1 ayat (3): *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Pernyataan dalam *groundnorm* tersebut menegaskan pula bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa jaminan segala hal guna

mewujudkan kesejahteraan telah dirumuskan melalui norma dasar sebagai pedoman perilaku negara. Salah satu perwujudan kesejahteraan tersebut adalah adanya penjaminan hak warga negara untuk mendapatkan keadilan.

Meskipun negara Indonesia mengakui adanya jaminan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya, akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup jika seluruh cita-cita tersebut tidak terimplementasi dalam kehidupan bernegara. Untuk itulah diperlukan sebuah upaya implementasi secara yuridis-konstitusional berupa produk hukum di bawahnya dan implementasi secara konkrit dalam masyarakat.¹ Dengan demikian, melalui peraturan yang berkesinambungan diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Mengenai hal ini Mochtar Kusuma Atmadja berpendapat:²

“Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan diperlukan. Hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu”.

Selain itu secara spesifik, disampaikan oleh Muladi:³

“Makna penegakan hukum adalah diwujudkan melalui perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil, disamping upaya mengembalikan fungsi hukum sesuai tatanan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, tanggung jawab, kebebasan, dan keadilan”.

¹Muchamad Ikhsan, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2-3.

²Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, Jakarta:BPHN-LIPI, hal. 9.

³Muladi, 2001, *Penegakan Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia*, Artikel, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3, September 2001.

Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia memerlukan kondisi-kondisi awal yang menunjukkan bahwa proses penegakkan hukum tersebut dilaksanakan. Kondisi awal itu antara lain meliputi keberadaan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan responsif. Ini artinya pemerintahan tersebut harus membuka peluang seluas-luasnya bagi keterbukaan informasi, persamaan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan peran serta masyarakat. Kendati demikian, dalam konteks kenegaraan pemerintah adalah perwujudan dari eksistensi sebuah negara, terkait dengan fungsi dan tujuan didirikannya negara untuk melindungi segenap warga negaranya.

Mengenai fungsi dan tujuan negara pun banyak ahli yang berbeda pendapat, namun ada yang menyebutkan bahwa sesungguhnya fungsi Negara adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan materiil bagi setiap warganya maupun jaminan perlindungan bagi setiap individunya. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa tanggung jawab pemerintah meliputi jaminan perlindungan warga negara Indonesia secara meluas di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, baik mengenai ancaman kepada warga Indonesia secara keseluruhan atau kepada masing-masing setiap individunya. Aliran ini didukung oleh pemikiran dari *James Wilford Garner*.⁴ Garner mengatakan bahwa negara memiliki tiga tujuan yakni: (1) Tujuan negara yang asli, dimana fungsi negara adalah mengutamakan kebahagiaan individu, (2) Tujuan negara sekunder, yang mengatakan bahwa fungsi negara adalah mensejahterakan warga negara

⁴F. Isjwara, 1999, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putra A Bardin, hal. 174.

secara kolektif, dan (3) Tujuan peradaban, yang bertujuan memajukan peradaban negara.

Salah satu konkritisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami atau dapat dipahami posisi warga negara sebagai korban kejahatan.

Meskipun jauh sebelumnya Negara Indonesia telah menempatkan jaminan perlindungan setiap warga negaranya di dalam hukum, baik warga negara sebagai subjek sekaligus *addressat* atau sasaran aturan hukum.⁵ Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Perjalanan dinamika hukum terkait perlindungan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan nampaknya semakin memberikan harapan besar kepada warga negara setelah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kemudian mendorong UUD 1945 untuk dilakukan amandemen guna memberikan tempat khusus di dalam konstitusi sebagai perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hal –hal

⁵Muladi, *Op. Cit.*, Hal. 4

yang terkait dengan perlindungan tersebut berdasar UUD 1945 amandemen

keempat, adalah meliputi:

1. Pasal 28 D

Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

2. Pasal 28 G

Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

3. Pasal 28 H

Ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ayat (3)

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

4. Pasal 28 I

Ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Ayat (2)

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Ayat (3)

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

5. Pasal 28 J

Ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Ayat (2)

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Tentunya mengenai hal ini pun, seharusnya tidak ada diskriminasi perlakuan kepada setiap warga negara sebagai pelaku kejahatan atau korban

dari sebuah kejahatan. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP nampak jelas bahwa perlindungan hak bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) berdasar sistem hukum Nasional telah mendapat perhatian yang cukup signifikan, disebutkan hak-hak tersebut di antaranya:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP;
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP;
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62;
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP;
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158
6. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan seterusnya.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar tidak terkatung-katung selama menjalani proses peradilan atau mendapat tindakan

yang sewenang-wenang.⁶ Meskipun seseorang telah diduga sebagai pelaku perbuatan pidana, secara serta merta tidak dapat dilanggar haknya sebelum ada putusan hakim yang bersifat tetap (*inkracht van gewijde*). Demikian berkembangnya asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, memaksimalkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat *rule of law*.⁷

Mengingat fenomena kejahatan merupakan bagian dari hukum pidana yang bersifat publik, sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁸ Maka perlu diketahui pula beberapa tujuan pembedaan dari hukum pidana yang meliputi:

- a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*), tujuan pembedaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan Roeslan Saleh mengemukakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁹

⁶C.S.T Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Keenam, hal. 371-374.

⁷www.kompascybermedia.com . A Ahsin Thohari. *Dimensi Historis Asas Retroaktif*. 19 Februari 2005, dikutip dari Muladi, 2002.

⁸Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto. hal 9.

⁹Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 5.

b. Teori Relatif (*Doeltheorie*), tujuan pemidanaan adalah:¹⁰

- 1) Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum agar mengetahui jika melakukan perbuatan yang sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula *general preventie*.
- 2) Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
- 3) Membinasakan (menjatuhkan hukuman mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Pandangan di atas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi (*bijzonderesanctierecht*), sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan.

Dalam perkembangannya, ternyata tidak semua ahli hukum menyetujui diadakannya pidana seperti itu, bahwa pidana adalah sebuah nestapa, karena disamping pidana membuat jera harus dipahami bahwa pidana juga memperjuangkan agar si pelaku kembali di dalam masyarakatnya sebagaimana mestinya. Demikian akhirnya pidana penjara menjadi pilihan yang tidak disukai, banyak kritik tajam yang ditujukan pada jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari efektifitasnya

¹⁰Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, hal. 4.

atau dari akibat-akibat lainnya yang menyertai dan berhubungan dengan perampasan kemerdekaan seseorang.¹¹

Paradigma mengenai perlindungan hak asasi manusia untuk membuat jera pelaku kejahatan inilah kemudian berkembang menjadi perlindungan hak manusia kepada yang lebih berhak menerima, yakni korban kejahatan sebagai penderita dari sebuah kejahatan baik secara materiil maupun imateriil. Hal tersebut, kemudian banyak melahirkan pendapat alternatif untuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, karena sebenarnya penderitaan pidana pelaku kejahatan tidak ada hubungannya dengan pemulihan keadaan korban tindak pidana.¹²

Masalah pentingnya perlindungan korban kejahatan ternyata telah memperoleh perhatian serius di lingkungan Internasional. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, yang mana dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan:¹³

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*, Bahan Penataran Hukum Pidana, Kupang: FH. Undana Kupang, 31 Juli – 12 Agustus 1989.

¹² Thodora Shah Putri, 1995, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Artikel, Jakarta: MAPPI. FH UI. hal.4.

¹³ *Ibid.*

payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”.

Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Sedikit banyak pemerintah Indonesia telah mencoba untuk mengakomodir deklarasi tersebut dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan perwujudan secara *atributif* dari UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sejak saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 perihal perlindungan korban seakan mendapat harapan, walaupun ada beberapa kalangan akademis dan praktisi hukum beranggapan bahwa substansi dari undang-undang tersebut belum maksimal dan memadai, namun perhatian terhadap saksi dan korban telah mulai mendapat pengaturan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang selengkap berbunyi:

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. Mendapat penerjemah;*
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. Mendapat identitas baru;*
- j. Mendapat tempat kediaman baru;*
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- l. Mendapat penasihat hukum; dan*
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir*

Namun perlu diketahui bahwa, hak yang dijamin pada Pasal 5 tersebut hanya diberikan kepada saksi atau korban dalam kejahatan tertentu saja dan harus mendapatkan keputusan dari LPSK. Mengenai maksud kasus tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasannya adalah meliputi: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan saksi atau korban dihadapkan pada kondisi yang membahayakan jiwanya. Mengenai perlindungan tersebut dijelaskan pada Pasal 28 UU Nomer 13 tahun 2006, bahwa pemberian bantuan perlindungan kepada saksi atau korban dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;*
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;*
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;*
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.*

Jika penulis runut mengenai fenomena kejahatan yang terjadi, tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2004 meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya. Selama tahun 2004 terjadi 209.673 kasus, sedangkan tahun 2003 terjadi 196.931 kasus. Tingkat resiko seseorang terkena kejahatan yakni 86 orang per 100.000 penduduk pertahun. Artinya, setiap 100.000 penduduk Indonesia, 86 orang menjadi korbannya.¹⁴ Kemudian pada tahun 2009, menurut catatan tahunan LPSK yang dihimpun dari media masa jumlah kasus korupsi (199 kasus), narkoba dan psikotropika (584 kasus), terorisme (1 kasus), trafficking (607 kasus), dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah (657 kasus). Pada tahun yang sama (2009) LPSK berhasil menghimpun laporan permohonan perlindungan yang masuk sebanyak 74 kasus.¹⁵

Jika dicermati dari data tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari jumlah kasus kejahatan yang dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian terhadap korban, tidaklah sebanding dengan jumlah besarnya angka kejahatan yang bisa ditangani oleh LPSK. Padahal dengan begitu banyaknya peristiwa kejahatan yang terjadi, sudah barang tentu setiap kejahatan tersebut pastilah menimbulkan korban kejahatan baik secara materiil maupun imateriil.

Sebagai contoh, bagaimana jika terjadi sebuah kejahatan yang masuk dalam tindak pidana biasa namun kerugian yang diderita korban dirasakan oleh pihak korban begitu besar, misal tindak pidana pemerkosaan. Boleh jadi

¹⁴Perlindungan perempuan.com, Anjani, 2005, "*Kekerasan Terhadap Perempuan*", dalam www.perlindungan-perempuan.com diakses tanggal 5 September 2010, pukul 23.30 Wib.

¹⁵LPSK.go.id, Catatan Akhir Tahun.2010. *Kondisi Saksi dan Korban Sepanjang Tahun 2009*, www.LPSK.go.id diakses tanggal 23 Februari 2011, pukul 10.47 Wib.

perlindungan terhadap korban sebagai upaya pembuktian tindak pidana bisa dilakukan, namun bagaimana pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korban, jika hal tersebut menyebabkan akibat yang berlanjut seperti dalam kasus pemerkosaan yang berakibat hamil misalnya, atau terjadi gangguan psikis yang diperlukan adanya upaya pemulihan nama baik si korban. Oleh karenanya, kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai representasi dari pemerintah untuk menjamin hak dari warga negara perlu diukur. Apabila model perlindungan tidak signifikan mengenai pemulihan kondisi korban, maka hasilnya adalah perampasan hak korban berikut tindakan penelantaran korban kejahatan.

Perlindungan korban kejahatan sebenarnya bukan hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan saja, akan tetapi lebih kepada hak korban untuk mendapatkan pemulihan keadaan layaknya sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini sebenarnya dapat ditempuh melalui sistem restitusi, kompensasi dan rehabilitasi korban kejahatan, dimana terdapat lima sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:¹⁶

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata. Tuntutan ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan yang diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan proses pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini masih bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (*punitive*) nya. Salah satu bentuk nya adalah “denda

¹⁶ Didik M. Arief Masyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*, Bandung: FH UNPAD, dalam Stefen Schafer, Ed., 1968, *The Victim and Criminal*, New York:Random House, hal. 112.

kompensasi” (*compensatory fine*), denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai satu bentuk ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.

4. Kompensasi yang bersifat perdata yang diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Dalam hal ini kompensasi tidak memiliki aspek pidana apapun walaupun diberikan melalui proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memiliki kewajiban memenuhi dan menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal melakukan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus, sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedang si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi kewajiban ganti rugi kepada korban. Peradilan pidana atau perdata tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus atau tersendiri dan independent yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Namun hingga sekarang, perlindungan terhadap korban kejahatan lebih difokuskan kepada kepentingan pembuktian sebagai (saksi) sebuah kejahatan, untuk terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi. Senada dengan konsideran UU Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut :

- a. *Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.*
- b. *Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu*
- c. *Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana”*

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Berangkat dari pemahaman bahwa korban adalah pihak yang paling dirugikan, haruslah mendapat jaminan dari negara, bukan hanya pada tindakan diskriminasi saja, akan tetapi lebih kepada perwujudan ganti rugi baik materiil maupun rehabilitasi. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu maupun kolektif baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah.¹⁷

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul:

PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar lebih terfokus dan lebih konsisten kepada objek yang diteliti, maka perlu diberikan pembatasan masalah. Dapat diketahui bahwa, perihal perlindungan hak korban kejahatan dalam hukum Nasional diantaranya meliputi: memperoleh jaminan keamanan, ikut serta dalam proses menentukan dan memilih dukungan keamanan, memberikan keterangan

¹⁷Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 129.

tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, memperoleh informasi dari perkembangan kasus, memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, memperoleh biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, memperoleh bantuan hidup sementara sampai jangka waktu perlindungan berakhir, mengajukan ganti rugi berupa tuntutan ganti rugi melalui restitusi dan kompensasi, serta memperoleh jaminan rehabilitasi. Permasalahan dalam penelitian ini di antaranya mengenai kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, akan dibahas mengenai kedudukan korban dalam sudut pandang viktimologi serta sejarah berlakunya KUHP, pembahasan mengenai perlindungan korban kejahatan dalam penelitian ini difokuskan mengenai perlindungan hak korban kejahatan melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dengan dipaparkan regulasinya dalam peraturan hukum Nasional, meliputi: UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Sebelum menginjak pada perumusan masalah, penulis akan menguraikan tentang pengertian perumusan masalah. Perumusan masalah

adalah pernyataan yang menunjukkan jarak antara anggapan dan kenyataan atau rencana dengan pelaksanaan.¹⁸

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana posisi korban dalam sudut pandang viktimologi?
2. Bagaimana posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sebuah penulisan haruslah memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari peneliti sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum. Tujuan penelitian tersebut adalah:

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal:32.

1. Untuk mengetahui posisi korban kejahatan dalam sudut pandang viktimologi.
2. Untuk mengetahui posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui regulasi perlindungan hak korban kejahatan melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam hukum positif di Indonesia.

Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis:

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya mengenai arti pentingnya perlindungan hak korban kejahatan sebagai salah satu langkah untuk mengawal proses penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah yang lebih baik.

Manfaat Pragmatis:

- a. Memberikan bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya

mengenai perlindungan hak korban kejahatan, khususnya melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama melakukan studi di Fakultas Hukum UMS.

D. Kerangka Pemikiran

Kedudukan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini belumlah ditempatkan secara adil atau bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man*,¹⁹ *forgotten person*, *invisible*,²⁰ *a second class citizen*, *a second victimization* dan *double victimization*.²¹

Hingga saat ini keberadaan korban kejahatan kurang mendapat perhatian, karena memang dalam peraturan pidana baik formil maupun

¹⁹ Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, dan Rili Windiasih, *Kedudukan Korban Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Vol. 12 No. 2 (Agustus 2007), FH UNIB Bengkulu dalam Joanna Shapland, Jon Willmore, Peter Duff, 1985, *Victim In The Criminal Justice System*. England: Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, hal. 1 dan 496.

²⁰ *Ibid.*, dalam Andrew Karmen, 1984, *Crime Victim An Introduction to Victimology*, California: Books/Cole Publishing Company Monterey, hal. 3.

²¹ *Ibid.*, dalam Robert Elias, 1986, *Community Control, Criminal Justice and Victim Series*, dalam Fattah, Ezzat A., 1986, *From Crime Policy to Victim Policy, Reorienting the Justice System*, London: The Macmillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2XS and London, hal. 290-303.

materiil sangat minim sekali dalam memperhatikan kepentingan korban kejahatan. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.

Mekanisme hukum pidana adalah penjatuhan pidana oleh hakim di dalam lingkup pengadilan, dengan demikian terjadi anggapan bahwa apabila pelaku telah dijatuhi hukuman berupa penderitaan maka secara serta merta hak korban kejahatan telah diberikan, namun jika dilihat lebih mendalam sebenarnya penderitaan yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidaklah ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Jika kita perhatikan rumusan hukum pidana materiil dalam KUHP, kedudukan korban masih belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, karena jika kita melihat perlindungan korban dalam hukum positif saat ini hanyalah sebuah perlindungan yang abstrak dan tidak langsung.²² Begitu juga dalam lingkup hukum pidana formil, kedudukan korban nampak jelas sangat dikesampingkan, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.²³ Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu

²²Barda Nawawi Arief, 1998 , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 55.

²³Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, hal.33.

hanya sebagai saksi.²⁴ demikian dapat dimungkinkan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.²⁵

Keadaan tersebut kemudian melahirkan teori yang tidak hanya memperhatikan hak pelaku kejahatan, akan tetapi juga memberikan perlindungan dan kepentingan korban kejahatan. Teori tersebut adalah teori restoratif, konsep dan filosofi dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang mengenai hak dan kepentingan antara pelaku serta korban tindak pidana, masyarakat dan Negara. Dengan demikian, peradilan restoratif dipercaya sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.

Menurut teori relatif atau teori restoratif, sebuah pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut *J. Andenese*s teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the teori of social defence*).²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sudah sepantasnya dipandang perlu untuk memperhatikan perlindungan korban kejahatan, hal ini terkait mengenai kedudukan atau posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana berupa pembuktian dalam peradilan, juga merupakan individu yang

²⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, Edisi Pertama – Cetakan Kedua, hal. 94.

²⁵ Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Pespektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press, Cetakan Pertama, hal. 47.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 14.

haknya telah dirampas, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah sebagai warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta memiliki jaminan perlindungan hak asasi setiap individunya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data tentang objek yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya. Maksudnya untuk mempertegas adanya hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang lama dalam rangka menyusun teori baru.²⁷ Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan.

2. Metode Pendekatan

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²⁸ Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain

²⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal. 10.

²⁸Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal: 310.

itu akan digunakan pendekatan analitis (*analitich approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik hukum.²⁹

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- 2) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 6) UU No. 13 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁹*Ibid.* hal. 310.

- 7) PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku bidang ilmu hukum, karya ilmiah, *paper* seminar, hasil penelitian, artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*).

e. Metode Analisis Data

Data awal yang diperoleh melalui inventarisasi peraturan perundangan, doktrin, dengan demikian belum dapat diambil sebagai kesimpulan yang dapat menjelaskan

tentang objek kajian penelitian. Untuk dapat ditarik kesimpulan maka perlu dianalisis, yaitu dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis menjadi enam bab, dalam setiap sistematisasinya disusun dengan tujuan untuk lebih memudahkan pembahasan pada setiap pokok bahasan. Dalam penyusunannya antara bab pertama sampai bab terakhir merupakan suatu kesatuan pembahasan yang saling terkait dan sistematis. Dalam Bab I yakni pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II menjelaskan tinjauan pustaka mengenai pembahasan tentang pengertian korban kejahatan, sejarah perkembangan berlakunya Hukum Pidana Kodifikasi, Penegakan hukum Pidana dalam Sistem peradilan Pidana, Viktimologi Kejahatan, Urgensi Perlindungan terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab III sampai dengan Bab V berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah penelitian. Dalam Bab III

mendeskripsikan mengenai posisi korban dalam sudut pandang viktimologi, kemudian Bab IV akan dibahas mengenai posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, Pada Pembahasan Bab V akan dilakukan analisis mengenai Perlindungan hukum terhadap korban melalui (restitusi, kompensasi dan rehabilitasi) dalam hukum positif Indonesia.

Bab VI merupakan penutup dari penulisan ini, maka penulis mencantumkan kesimpulan dan saran dalam bab ini.